

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam negara-negara yang menganut demokrasi, Partai politik merupakan salah satu bentuk pelebagaan demokrasi yang mana dianggap sebagai representasi resmi aspirasi rakyat. Partai politik menjadi penghubung antara proses-proses yang terjadi di pemerintahan dengan dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, partai politik bisa dikatakan yang sebetulnya menentukan demokrasi di suatu negara. Pengertian Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Konsep mengenai pelebagaan partai politik telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah konsepsi pelebagaan partai politik yang dikemukakan oleh Vicky Randall dan Lars Svasand. Dengan merujuk dari beberapa dimensi pelebagaan partai politik yang dikemukakan oleh Huntington, Panebianco, dan Kenneth Janda, Vicky Randall dan Lars Svasand kemudian merumuskan bahwa : “pelebagaan partai politik dipahami sebagai proses

¹Aprista Ristyawati. (2019). Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelebagaan Demokrasi. Jurnal *Administrative Law & Governance*. Volume 2 Nomor 4. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.710-120> Universitas Diponegoro. Semarang. Hal 711

pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya.²

Vicky Randall dan Lars Svasand menawarkan parameter pelembagaan partai politik untuk menilai terlembaga atau tidaknya suatu partai politik dapat menggunakan empat parameter. Parameter tersebut merupakan hasil persilangan dari aspek kultural (*Attidunal*)-struktural (*Structural*) dengan aspek internal-eksternal. Hasil persilangan pertama antara aspek internal dan struktural disebut kesisteman (*systemness*). Kedua, persilangan antara aspek internal dan kultural yaitu identitas nilai (*value infusion*). Ketiga, persilangan antara aspek eksternal dan struktural yaitu otonomi sebuah partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*). Keempat, persilangan antara aspek eksternal dan kultural menghasilkan derajat citra partai di mata publik (*reification*).³ Adapun Dimensi Pelembagaan Partai yang mengandung dua aspek yaitu internal dan eksternal, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

² Muhammad Lutfi (2012). Pelembagaan Partai Politik Di Tingkat Lokal (Studi tentang Pelembagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai Pasca Kekalahan pada Pemilu 2009). Program Pasca Sarjana Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Hal 5

³ Rowdotusya'adah (2018). Pelembagaan Partai Politik Dan Faksi Intra-Partai (Studi tentang Kemunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat). Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Hal 5

Tabel 1.1
Dimensi Pelembagaan Kepartaian Menurut Vicky Randall dan Lars Svasand⁴

Dimensi Kepartaian	Internal	Eksternal
<i>Structural</i> (Struktural)	<i>Systemness</i> (Kesisteman) (1)	<i>Decisional autonomy</i> (Otonomi Keputusan) (3)
<i>Attitudinal</i> (Kultural)	<i>Value infusion</i> (Identitas Nilai) (2)	<i>Reification</i> (Citra pada Publik) (4)

Sumber data diolah dari Vicky Randall dan Lars Svasand Tahun 2002

Pelembagaan partai dalam aspek pengelolaan organisasi internal dan eksternal partaimerupakan salah satu faktor penentu keberhasilan partai meraih suara dalam pemilu. Seperti yang dikemukakan oleh Firmanzah, bahwa peran partai secara institusional sebagai pusat yang mengendalikan kemenangan dalam pemilu itu sendiri. Aspek organisasi partai politik merupakan entitas yang penting untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan pada sebuah pemerintahan. Keberhasilan sebuah partai politik terletak bagaimana mekanisme internal dan eksternal pelembagaan partai tersebut. Kemampuan partai politik dalam mencapai fungsi dan tujuannya merupakan integrasi dari struktur organisasi, perilaku aktor dan kelompok dalam organisasi, serta proses di dalam partai politik tersebut. Apabila internal dan eksternal partai bermasalah, maka sangat kecil kemungkinan harapan partai untuk dapat mencapai fungsi dan tujuannya secara optimal.⁵

⁴Randall, Vicky, dan Lars Svasand. 2002. "Party Institutionalization in New Democracies", dalam Jurnal *Party Politics*, Vol.8 No.1, pp. 5-29. London: Sage Publication. Hal 12

⁵Ardiansyah. (2015). Tesis Pelembagaan Partai Aceh (Partai Lokal Eks Kombatan GAM) : Kegagalan Partai Aceh Dalam Mempertahankan Keutuhan Internal. Program Pascasarjana Program Studi Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Hal 4

Geys sebagaimana dikutip Haris, dkk., menyebutkan bahwa secara umum, pemilu serentak atau lazim juga disebut sebagai pemilu konkuren (*concurrent elections*) adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional, hingga pemilihan di tingkat lokal.⁶

Pemilu 2019 menjadi momentum politik baru bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Pada ajang demokrasi lima tahunan tersebut, gelaran Pemilu 2019 berbeda skema dari pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pertama kalinya pemilu digelar secara serentak (*concurrent election*), yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan dilaksanakan pada waktu bersamaan pada 17 April 2019. Pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi dilaksanakan dengan format waktu yang berbeda, yakni pemilihan legislatif mendahului pelaksanaan pemilihan presiden.⁷

Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diadakan setiap 5 tahun sekali. Adapun Partai Amanat Nasional yang akan menjadi Fokus kajian penelitian penulis merupakan partai pemenang pemilu 2019

⁶ Ratna Solihah (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Volume 3 Nomor 1. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Diponegoro. Semarang Hal 76

⁷ Ridho Imawan Hanafi (2018). Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik* .Volume 15 Nomor 2. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.761> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta. Hal 197

di Kabupaten Manggarai Timur dengan memperoleh 5 Kursi dari 30 Kursi DPRD Kabupaten Manggarai Timur yang tersebar di 5 Daerah Pemilihan (Dapil) yang akan dijelaskan secara terperinci pada table berikut ini.

Tabel 1.2

**Jumlah Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Legislatif
Kabupaten Manggarai Timur 2019**

Parpol	Perolehan Suara					Jumlah
	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	5 Dapil
PKB	3.768	2.681	2.017	2.939	1.362	12.767
Gerindra	2.219	2.542	726	2.587	2.172	10.246
PDIP	4.417	1.558	1.558	3.718	1.871	13.122
Golkar	3.356	2.357	634	1.730	2.495	10.572
Nasdem	2.207	1.994	1.115	3.045	3.079	11.440
Garuda	108	105	33	83	88	417
Berkarya	2.348	100	47	88	97	2.680
PKS	2.835	1.296	1.184	3.142	1.554	10.011
Perindo	2.871	2.541	2.331	2.850	3.126	13.719
PPP	101	47	46	1.145	50	1.389
PSI	1.474	3.018	602	882	612	6.588
PAN	3.993	3.580	2.841	3.863	3.410	17.687
Hanura	2.534	3.099	1.537	3.405	3.722	14.297
Demokrat	1.621	2.167	1.752	1.675	2.534	9.749
PPP	289	3.148	11	1.777	14	5.239
PKPI	1.581	2.437	1.004	1.144	870	7.036
Jumlah	35.722	32.670	17.438	34.073	27.056	146.959

Sumber data diolah dari KPU Manggarai Timur 2019

Tabel 1.3

Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur Periode 2014-2019 dan 2019-2024 Partai Amanat Nasional

Anggota DPRD PAN Periode 2014-2019		
Nama	Dapil	Kecamatan
Monika Tandiseru, S.Pd	I	Elar, Elar Selatan, Lamba Leda dan Sambu Rampas
Martinus Durung	II	Poco Ranaka dan Poco Ranaka Timur
Hermias Dupa, S.Ikom, M.Si	III	Borong dan Rana Mese
Anggota DPRD PAN Periode 2019-2024		
Heremias Dupa	I	Borong dan Rana Mese
Ovan Jeramat	II	Poco Ranaka dan Poco Ranaka Timur
Sifridus Asman	III	Lamba Leda
Agustinus Tangkur	IV	Sambu Rampas, Elar dan Elar Selatan
Vinsentius Roja	V	Kota Komba

Sumber data diolah dari KPU Manggarai Timur 2014 dan 2019

Dengan melihat data tabel 1.3 diatas bahwa ada Peningkatan Signifikan Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur dari 3 orang pada periode 2014-2019 menjadi 5 orang pada periode 2019-2024 . Dengan melihat kondisi riil tersebut, peneliti menduga bahwa adanya Peningkatan Signifikan Jumlah Anggota DPRD Partai Amanat Nasional (PAN) tidak terlepas adanya Pelembagaan Partai Politik, sehingga menarik perhatian penulis untuk mengambil penelitian dengan judul **“INSTITUSIONALISASI POLITIK (Studi Kasus Pelembagaan Politik Partai Amanat Nasional di Kabupaten Manggarai Timur Dalam Pemilu 2019 Menurut Perspektif Vicky Randall Dan Lars Svasand)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelembagaan Politik Partai Amanat Nasional di Kabupaten Manggarai Timur Dalam Pemilu 2019

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan mengetahui Pelembagaan Politik Partai Amanat Nasional di Kabupaten Manggarai Timur Dalam Pemilu 2019

1.4 Kegunaan Penelitian

A. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Pelembagaan Partai Politik bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan

B. Manfaat Praktis

- 1) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya
- 2) Agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mengetahui Pelembagaan Politik oleh Partai Amanat Nasional secara Khusus serta Partai Politik Peserta Pemilu lainnya secara umum